

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI  
SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DI INDONESIA  
(Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia  
Pasca Amandemen UUD 1945)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**WILLY WAHYU ASTUTI**

**NPM : 1721020320**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2021**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI  
SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DI INDONESIA  
(Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia  
Pasca Amandemen UUD 1945)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**WILLY WAHYU ASTUTI**

**NPM : 1721020320**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.SY</b>

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 M / 2021**

## ABSTRAK

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ketentuan didalam UUD 1945 yang pasal pasalnya banyak yang menguatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah.

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakang oleh, Indonesia sudah menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara lebih murni setelah Amandemen UUD 1945 dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tetapi yang diterapkan tetap menggandung parlementer, realitas saat ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensial dihadapkan dengan sistem multipartai yang seharusnya lebih cocok diterapkan disistem pemerintahan parlementer, yang menimbulkan tidak efektif dan stabil nya pemerintahan karena banyak nya partai yang berada diparlemen.

Skripsi ini mencoba menggali tentang bagaimana bentuk anomali sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang kemudian di analisis menggunakan fiqh Siyasah

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research ) yang dilakukan membaca buku-buku , undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel yang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia Sebagai bahan penelitian melalui data data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis.

Hasil skripsi ini menunjukan faktor yang menyebabkan Anomali Sistem pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia ialah, *Pertama* perpaduan sistem presidensial dan multipartai di era reformasi, *kedua* koalisi yang rapuh yang hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan partai, *Ketiga* reduksi kekuasaan presiden. Hal ini tentu tidak relevan dengan pemeritahan Islam karena adanya kompromi dalam pemerintahan yang menyebabkan tidak berfungsinya *check and balances* hal ini bisa mengakibatkan terabaikannya kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah maka bertentangan dengan konsep Imamah.

Namun untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia agar bisa menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif, yaitu dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartaian yang akan mengikuti pemilu, koalisi yang dibangun harus solid dan kuat agar bisa menstabilkan pemerintahan. untuk kepentingan rakyat bukan hanya untuk mencari kekuasaan dan kepentingan partai.

**Kata kunci : Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Multipartai. Koalisi, dan penyederhanaan kepartaian**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Wahyu Astuti  
NPM : 1721020320  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945)”. Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2021

Penulis,



**Willy Wahyu Astuti**

NPM 1721020320





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISI FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI  
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI  
INDONESIA**  
**Nama : Willy Wahyu Astuti**  
**NPM : 1721020320**  
**Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zukhraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.SY.**  
**NIP. 198311232019031005**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945).” Disusun Oleh, Willy Wahyu Astuti, NPM : 1721020320, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal :**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

**Penguji Pendamping II : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.sy**

**DEKAN FAKULTAS SYARI’AH**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 19621022199303100

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ( QS. Anissa : 58)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Perli dan Wilma , berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Sahabat dan Teman-teman kelas Intenasional, terimakasih atas pengorbanan dukungan serta doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada sahabat dan teman-teman sekelas
3. Seluruh keluarga besar UKM-F MCC Lampung yang siap sedia memberikan semangat dan motivasi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap Penulis Willy Wahyu Astuti, lahir pada tanggal 24 Oktober 1999, Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Anak dari pasangan Bapak Perli dan Ibu Wilma.

1. Tk Darul Mutaqien Kota Batu. Kec Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. 2005-2006
2. Sekolah Dasar Negeri Suka Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2006-2010
3. Sekolah Dasar Negeri 2, Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2010-2011
4. Sekolah Menengah Pertama 1, Bpr Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2011-2014
5. Sekolah Menengah Atas 1, Bpr Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2014-2017
6. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).
7. Menjabat sebagai Ketua Divisi Dana usaha UKM-f MCC UIN Raden Intan Lampung Periode 2019/2020
8. Menjabat Sebagai Sekertaris Bidang Sosial Kemasyarakatan Dema Fakultas Syariah UIN Raden Imtan Lampung periode 2019/2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (*Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.,SY. Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada sahabat dan Teman teman kelas Internasional yang telah memberikan dorongan dan Motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do’a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2021

**Willy Wahyu Astuti**  
NPM 17210203

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II TEORI BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN**

A. Teori Pemisahan Kekuasaan .....	15
B. Teori dan Bentuk Sistem Pemerintahan .....	16
1. Pembagian Teori Sistem Pemerintahan .....	16
2. Bentuk Pemerintahan .....	19
C. Teori sistem Multipartai dan Koalisi Sistem Presidenaial .....	20
1. Sistem Multipartai.....	20
2. Koalisi Sistem Presidensial .....	22
D. Konsep Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah .....	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	23
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	24
3. Sistem Pemerintahan Islam dalam Konsep Dusturiyah .....	25

### **BAB III Deskripsi Objek Penelitian**

A. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .....	35
B. Karakteristik yang Mempengaruhi sistem Presidensial di Indonesia ..	39
1. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .....	40



2. Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial .....	41
C. Potret Sistem Multipartai pada Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 .....	42
1. Konfigurasi politik Terbentuknya Sistem Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono .....	43
2. Konfigurasi Politik terbentuknya Pemerintahan Jokowi-Widodo Yusuf Kalla Terjadinya Divided Government. (2014-2019) .....	45
D. Konfigurasi Politik Terbentuknya Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada pemilihan serentak 2019 .....	51
1. Tipologi Koalisi Pencalonan Presiden dan wakil Presiden pada pilpersi 2019 .....	52
2. Perubahan koalisi Pada Pemilu Serentak 2019 .....	53

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 .....	57
1. Analisis Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen .....	57
2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 .....	61
B. Hasil Temuan .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I. II.C.1 Sistem Kepartaian Giovani Sartori.....	27
Tabel III B.1 Perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen .....	45
Tabel III. C.I Pergeseran Jumlah Partai Politik di Indonesia (1999-2019).....	53
Tabel III. C. 2. 2 Jumlah Kursi Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif 2014.....	58
Tabel III.C.3.2 Polarisasi Dua koalisi di DPR setelah Pileg 2014 dan sebelum Pilpers 2014 .....	59
Tabel III.C.4.2 Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 .....	60
Tabel. III.C.5.2Komposisi kabinet Kerja Jokowi-Jk.....	62
Tabel III D.1.1 Perbandingan Ideologi Patai Koalisi Kubu Jokowi dan Prabowo .....	66
Tabel III D.2.2 Pereolehan Kursi DPR Partai Pendukung Jokowi dan Prabowo .....	68
Tabel III D.3.2 Susunan Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf .....	69





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)** “. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, kerangka untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya) penguraian suatu pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman arti secara keseluruhan <sup>1</sup>

Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu di teliti dan di rumuskan secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut <sup>2</sup>

Anomali adalah bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak normalan <sup>3</sup>

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sehingga sistem ini juga dikenal dengan sistem pemisahan kekuasaan<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , edisi keempat (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2011), 58.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah* , (jakarta :kencana , 2014 ) , 4.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 72.

<sup>4</sup> Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada , 2017), .23.

Indonesia adalah nama negara kepulauan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Benua Australia <sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sehingga sistem ini dikenal pula dengan sistem pemisahan kekuasaan. Jimly Assidique memberikan ciri- ciri yang lebih mendetail tentang sistem pemerintahan presidensial yaitu

1. Masa jabatan tertentu yakni periode masa jabatan dibatasi dengan tegas
2. Presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab atas parlemen melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan wapres hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus pidana tertentu
3. Presiden dan wapres dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen
4. Presiden tidak tunduk terhadap parlemen, parlemen tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden dan membubarkan kabinet
5. Tidak dikenal pembedaan kepala pemerintahan dan kepala negara
6. Tanggung jawab pemerintahan berada pada presiden oleh karena itu, Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri (*concertration og govening power and responsibility upon the president*).

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father* ) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 532.

pada 29 Mei-1juni dan 10-12 Juli 1945<sup>6</sup>. Meskipun dalam perdebatan yang cukup rumit Soepomo yang memiliki andil cukup besar dalam gagasan pembentukan pemerintah Indonesia, yang kemudian disetujui oleh peserta sidang.

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amademen) mengatakan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial, tetapi sistem yang diterapkan tetap mengandung ciri parlementernya, yaitu dengan adanya MPR yang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, tempat di mana presiden harus tunduk dan bertanggung jawab<sup>7</sup>. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia tidak begitu murni. Karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat namun setelah adanya amademen, tepatnya amademen ketiga sistem pemerintahan presidensial sudah lebih murni.

Dikatakan lebih murni karena presiden menurut UUD NRI 1945 sebelum amademen, harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden menurut UUD NRI 1945.presidente sebelum reformasi adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh MPR ini justru memperlihatkan adanya unsur parlementer yang dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut. Namun setelah diamademen presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR sebagai Mandataris MPR.

Dalam sistem presidensial, pemilihan umum presiden rakyatlah yang akan memilih dan yang menentukan secara langsung, sehingga legitimasi presiden sangat lah kuat. Sebagaimana Indonesia mengganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat itu selanjutnya dijalankan dalam mekanisme kelembagaan yang bernama partai politik. Kemudian partai politik saling berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan negara melalui

---

<sup>6</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi , Menguatnya Model legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010).48

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konsitusi Press . 2006.h.61



mekanisme pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum wakil/presiden. Indonesia telah menganut sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai yang berkembang sejak era reformasi. Pemilihan secara langsung menjadikan legitimasi presiden lebih kuat, sementara itu. Sistem multipartai telah menghasilkan parlemen (DPR) yang kuat juga, Sehingga sistem Presidensial di Indonesia belum mampu menghasilkan sistem pemerintahan yang efektif dan stabil, kondisi yang seperti ini menyebabkan presiden susah memiliki kekuasaan mayoritas dalam membentuk pemerintahan. Koalisi menjadi pilihan yang harus dilakukan presiden terpilih jika ingin pemerintahannya efektif dan stabil, konfigurasi politik seperti ini mengakibatkan presiden terpilih yang memiliki mandat besar dari rakyat mesti menggalang koalisi besar agar pemerintahan berjalan dengan stabil. Presiden terpilih juga harus merekrut menteri-menteri yang mendapatkan dukungan dari partai sehingga mengganggu hak prerogatif dari presiden. Ada beberapa dampak negatif dari perpaduan sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial yaitu, *Reshuffle* kabinet menjadi sangat politis, hak prerogatif presiden dilemahkan, pertimbangan politis dalam mengambil kebijakan, dan melemahkan karakter kepemimpinan Nasional.

Masalah sistem pemerintahan dalam Islam sudah ada tuntunan dan norma-normanya karena syari'at Islam telah meliputi semua perbuatan manusia dengan lipatan yang sempurna dan menyeluruh. sebagaimana firman Allah dari surat An-Nahl ayat 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِّلْمُسْلِمِينَ

*dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri( Qs An-Nahl 89)*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al -Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 277.

Islam sebagai agama yang komperensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan, baik mengenai konsep prinsip ataupun tujuan semesta telah diatur oleh Islam. Di negara baru Madinah, bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam Islam memang tidak mengatur masalah sistem pemerintahan presidensial dan Islam juga tidak secara *expresif* juga tidak menentukan bahwa suatu negara harus memakai suatu sistem pemerintahan tertentu. Namun sistem pemerintahan dalam Islam tercermin dari sebagaimana konsep Imamah di mana hal ini secara ekspilisit telah diatur dalam siyasah *dusturiyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat., dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dalam tatanan sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem multipartai di Indonesia Presiden harus melakukan koalisi untuk menjadi mayoritas dalam parlemen agar pemerintah yang dijalankan berjalan dengan stabil dan efektif, peristiwa koalisi ini juga banyak terjadi di zaman rosulullah maupun sahabat yang menggambarkan peristiwa koalisi.

Koalisi secara bahasa sepadan dengan kata *al tahalluf* (kompromi) berasal dari kata *al-Hilfu* yang artinya perjanjian untuk saling menolong, ia berasal dari kata *halafa-yahlifu-hilfan*.<sup>9</sup>

Koalisi dalam pemilihan kepala Negara bisa dilihat dalam peristiwa *ba'at*. *Ba''at* berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual, *ba'at* dimaknai saling berjanji atau saling setia.<sup>10</sup> Peristiwa *ba'at* yang berkaitan dengan adanya sistem koalisi tersebut di antaranya adalah pembaiatan terhadap khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Di mana pada saat itu

---

<sup>9</sup> Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Al-BISRI, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 130.

<sup>10</sup> Suyuti Pulungan *fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 72

terjadi perdebatan yang sengit antara kaum anshar dan kaum muhajirin tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW.

Pada peristiwa itu tersebut Umar mengusulkan agar Abu Bakar yang menjadi pemimpin namun usulan tersebut tidak begitu saja langsung diterima malah terjadi perdebatan. Ada beberapa nama selain Abu Bakar yang dikemukakan masyarakat saat itu, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Sa'd bin Ubadah. Di tengah-tengah perdebatan tersebut akhirnya ada dua orang yang masing-masing dari suku Kharaj dan dari kaum 'Aus yang kemudian menyatukan baiatnya terhadap Abu Bakar. Orang tersebut adalah Basyir bin Sa'd, ayah Nu'man bin Basyir, saudara sepupu Sa'd bin Ubadah, ketua suku Kharaj dan pemimpin kaum 'Aus, Usaid bin Hudhair.<sup>11</sup> Maka setelah Umar Bin al-Khattab dan dua orang tersebut menyatakan Ba'atnya kepada Abu Bakar, *ba'at* tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga dengan demikian Abu Bakar yang akhirnya terpilih sebagai Pemimpin.<sup>12</sup>

Uraian di atas menggambarkan bagaimana sistem koalisi pernah terjadi di dalam pemerintahan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.

### C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, namun dalam praktiknya tidak diterapkan secara murni maka akan menimbulkan Anomali Sistem Presidensial. Yaitu dengan menyandingkan sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial, Menurut pandangan Scot Mainwaring Presidensialisme akan menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistem multipartai. Peneliti ingin memahami analisis fiqh siyasah terhadap anomali sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia. Fokus berikut

---

<sup>11</sup> O.Haskem, *sejarah Islam : Wafat Rasulullah Dan suksesi Sepeninggal Beliau Di Saqifah*, (Jakarta : Yapi, 2004 ), 108

<sup>12</sup> *Ibid.*

dibuat setelah melakukan Pengkajian kepustakaan yang relevan dan juga mengamati perkembangan politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan masa pemerintahan Jokowi di media elektronik.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, Rumusan masalah yang akan dibahas diskripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Yang ada di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia, apa yang menjadi anomali sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia dan penyebabnya.
2. Memberikan Kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai Analisis Fiqh Siyasah terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial yang ada di Indonesia

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama ilmu Siyasah pada umumnya dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian yang secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Setelah melakukan penelusuran penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Mohammad Naufal Eprilitian Salsabil, 2019 Yang berjudul “*sistem Pemerintahan Presidensial dan Dinamika hubungan Eksekutif Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi Pasca Referendum 2017*” dalam skripsi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah. skripsi ini membahas tentang sistem pemerintahan presidensial antara Indonesia dan Turki memiliki sejarah yang panjang mengenai bentuk Pemerintahan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem Pemerintahan Presidensial pada 17 Agustus 1950 Indonesia merubah sistem pemerintahan menjadi parlementer dan kembali lagi menjadi sistem pemerintahan presidensial setelah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga saat ini. Turki juga memiliki sejarah Panjang mengenai bentuk pemerintahan mulai dari berdiri pada tahun 1923 yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer lalu berganti menjadi sistem parlementer pada tahun 2017. Praktik sistem Presidensial di Indonesia dan Turki berbeda. Praktik sistem pemerintahan di Indonesia masih dipengaruhi oleh partai politik dalam dua kasus. Sedangkan di Turki, Praktik Sistem Presidensial dipengaruhi oleh kekuatan Eksekutif dan koalisi partai<sup>13</sup>. Adapun Persamaan dari skripsi Mohammad Naufal Eprilitian Salsabil sama-sama membahas sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia. Perbedaan nya adalah skripsi karya Mohammad Naufal

---

<sup>13</sup> Mohammad Naufal Eprilitian Salsabil, *sistem Pemerintahan Presidensial dan Dinamika hubungan Eksekutif Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi Pasca Referendum 2017* ( Skripsi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, 2019 )

Eprilitian Salsabil ini membahas mengenai perbandingan sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan Turki. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perjalanan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sejak diterapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni, dan pembahasan mengenai Anomali sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang di analisis melalui Fiqh Siyasah

2. Skripsi Abdul Hakim, 2017 yang berjudul "*Penyederhanaan sitem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam persefektif Siyasah Syar'iyah*" dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas upaya penyederhanaan partai politik melalui undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikaji melalui *Siyasah Syar'iyah* dan Politik Hukum, menemukan bahwa sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah . UU No. 7. Tahun 2017 berupaya memperketat partai politik yang ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke parlemen<sup>14</sup>. Adapun persamaan dari skripsi Abdul hakim adalah pembahasan tentang sistem pemerintahan presidensial yang disandingkan dengan sistem multi partai. Sedangkan perbedaan nya adalah skripsi Abdul hakim membahas tentang penyederhanaan patrtai politik melalui UU. No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sedangkan penelitian ini membahas tentang perjalanan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sejak diterapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni, dan pembahasan mengenai Anomali sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang di analisis melalui Fiqh Siyasah.
3. Skripsi karya Satriyansah Den Retno Wandana 2020, yang berjudul "*Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial melalui konfigurasi*

---

<sup>14</sup> Abdul Hakim, *Penyederhanaan sitem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam presefektif Siyasah Syar'iyah* ( Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017 )



*Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini membahas Sistem pemerintahan di Indonesia, sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai dinamika di mana sistem pemerintahan silih berganti dari konfigurasi parlementer ke presidensial. Pada akhirnya dalam agenda Amandemen UUD 1945 Indonesia memilih untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan senantiasa melakukan perbaikan atau purifikasi sistem. Namun pelaksanaan yang demikian kerap menimbulkan permasalahan di dalam praktik ketatanegaraan. Di mana instabilitas sistem presidensial yang diakibatkan penerapan sistem multipartai dan adanya norma *presidential threshold*, diharapkan dapat diperbaiki dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif (presiden) serentak. Skripsi ini menunjukkan bahwa pemilihan umum serentak memiliki kaitan dalam penataan sistem presidensial, pemilihan umum eksekutif dilaksanakan dengan ketentuan fitur formula elektoral *majority run off* dengan dua kandidat presiden dan pelaksanaan pemilu legislatif dilaksanakan dengan ketentuan fitur formula elektoral proporsional terbuka, ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen), *distric magnitude* sebesar 3-10 kursi dan menunjukkan adanya efek ekor jas . Dan pelaksanaan pemilihan umum presiden hanya menunjukkan penguatan sistem dari segi kandidat yang bertarung saja, sedangkan pemilihan legislatif menunjukkan penguatan dengan adanya efek ekor jas<sup>15</sup>. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis sama sama membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas tentang penataan sistem pemerintahan presidensial melalui pemilihan Umum serentak di Indonesia. umum sedangkan penelitian ini membahas tentang perjalanan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sejak diterapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni, dan

---

<sup>15</sup> Satriyansah Den Retno Wandana, *Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial melalui konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia* ( Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 )

pembahasan mengenai Anomali sistem Pemerintahan Presidensiadi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang di analisis melalui Fiqh Siyasah.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan<sup>16</sup> metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian. Adapun langkah langkah tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reaserch*), jenis penelitian yaitu “penelitan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam- macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, dokumen, majalah, kisah, jurnal dan lainnya”<sup>17</sup>

Terkait penelitian ini , penulis melakukan penelitian *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. ( Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 )*

#### b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian bersifat deskriptif kualitatif , yaitu “suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya .”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, pusat penelitan dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h.21

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketiga* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 33.

<sup>18</sup> Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ketiga* ( Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 10.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data “bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar , peraturan dasar, peraturan perundangan bahan-bahn hukum yang tidak dikodifikasikan , Yurifrudensi traktat maupun bahan hukum yang dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku.”<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presdien dan Wakil Presiden

Kemudian kaitanya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data data yang berdasarkan pada buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan juga Fiqh Siyasah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>20</sup>

Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data yang bersumber dari buku, majalah, jurnal, dokumen, pendapat ahli dan lain-lain yang berkenan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu analisis fiqh siyasah terhadap anomali sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”<sup>21</sup>

Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data-data yang berdasar dari kamus, trasnkip, wikipedia, internet daftar bacaan katalog perpustakaan dan lain lain yang berkaitan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,h.52

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dengan judul penelitian, yaitu analisis fiqh siyasah terhadap anomali sistem pemeritahan presidensial di Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan melakukan survey kepustakaan dan study literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Survey kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain yang dihimpun kedalam sebuah daftar pustaka, sedangkan studi literatur yang dimaksud ialah dengan mempelajari, memahami, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### **4. Metode Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menggunakan pendekatan Induktif, yaitu dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan di deskripsikan. Adapun teori yang digunakan menggunakan teori sistem pemerintahan yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia maupun sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan pada UUD NRI 1945 dan UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Cara Kerjanya, data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Setelah data-data terhimpun dan selesai diolah, proses selanjutnya ialah dengan melakukan analisa secara berlapis. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Sedangkan proses pengembangan analisa dilakukan dengan

menggunakan pendekatan teori, dan imajinasi kreatif penulis secara bertahap dalam pengumpulan data.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian dibagi ke dalam lima bab. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab I, penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Yang akan digunakan dalam penelitian ini

Bab II, penulis mengeksplorasi kerangka teori yang akan digunakan sebagai rancang bangun konseptual guna menjawab penelitian ini.

Bab III, penulis memfokuskan diri pada deskripsi objek penelitian, Gambaran Umum Objek, dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

Bab IV, Penulis melakukan Analisa untuk menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya Anomali pada Sistem Pemeritahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Analisis Fiqh Siyasah pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Bab V, Penulis menjabarkan kembali temuan-temuan yang diperoleh dalam bab IV untuk dijadikan kesimpulan dari penelitian ini serta akan dipaparkan tentang beberapa rekomendasi untuk selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Pemisahan Kekuasaan.

Teori Pemisahan Kekuasaan merupakan ide untuk memisahkan kekuasaan keinginan untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara melalui pengelolaan kekuasaan dalam internal negara.<sup>22</sup> Ide pemisahan kekuasaan dibedakan dan dipisahkan ke dalam fungsi yang berbeda.<sup>23</sup> John Locke dan Montesquieu merupakan tokoh yang sering dikaitkan dengan ide pemisahan Kekuasaan dan dianggap sebagai orang yang mengawali Ide pemisahan kekuasaan. *Two Treaties On Civil Government* (1690) karya John Locke dan *The Spirit Of Laws* (1748) karya Charles –Louis de Secondat Baron de Montesquieu, dua karya ini menjadi ide rujukan mereka.

Dalam karya John Locke, terlihat keprihatinan John Locke terhadap kekuasaan monarki absolut yang menghilangkan hak-hak rakyat<sup>24</sup>. Di antara langkah mencegah kekuasaan absolut tersebut adalah dengan memisahkan menjadi kekuasaan legislatif (*legislative Power*), kekuasaan Eksekutif (*executive power*) dan Federatif (*federatif power*).

Menurut Locke kekuasaan legislatif mendapat amanah dari rakyat untuk menjalankan fungsi sebagai pembentuk hukum, tidak ada hukum yang dapat berlaku tanpa diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan Legislatif walaupun mendapat dukungan dari berbagai pihak<sup>25</sup>. Namun kekuasaan yang terdapat di legislatif perlu dibatasi, Locke menekankan batasan materi hukum yang dapat dibuat oleh legislatif. Walaupun rakyat telah memandatkan kekuasaan untuk membentuk hukum kepada lembaga legislatif, bukan berarti lembaga legislatif dapat membuat hukum seenaknya. Menurut Locke hukum alam atau perintah Tuhan menjadi batasan yang harus dipatuhi oleh siapa pun termasuk pembentuk hukum dan pokok dari hukum alam tersebut adalah mempertahankan

---

<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2006), 15

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Edited and with an Introduction by Ian Shapiro, ( New Heaven and London: Yale University Press 2003)

<sup>25</sup> *Ibid*



kemanusiaan. Oleh karena itu tidak boleh ada hukum yang lahir melawan ketentuan itu<sup>26</sup>

Untuk pelaksanaan produk-produk legislatif, Locke menyatakan perlu dibentuk lembaga yang terpisah dari lembaga legislatif, yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini diperlukan karena hukum yang dibentuk oleh legislatif memerlukan penerapan berkelanjutan oleh karena itu diperlukan kekuasaan yang efektif bekerja sehari-hari untuk memastikan hukum tetap tegak di masyarakat secara terus-menerus.<sup>27</sup> Ada satu lagi jenis kekuasaan yang berfungsi hubungan luar negeri termasuk kekuasaan menentukan perang dan damai. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan federatif.

Montesquieu mengajukan Ide pemisahan kekuasaan legislatif, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan John Locke yaitu berfungsi untuk mengeluarkan hukum, mengubah atau mencabut hukum. Sedangkan kekuasaan eksekutif disebutkan memiliki kekuasaan dalam menentukan perang dan damai, mengutus dan menerima duta, menetapkan keamanan umum serta mempersiapkan diri dalam hal terjadi invasi. Kekuasaan yang ketiga yang berbeda dari konsep John Locke adalah kekuasaan yudisial yang bertindak untuk menghukum penjahat atau memutus perkara antara individu. Dengan mengembangkan konsep *Trias Politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 ( tiga ) cabang, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

## **B. Teori dan Bentuk Sistem Pemerintahan.**

### **1. Sistem Pemerintahan**

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif. Cara pandang yang demikian sesuai dengan teori *dichotomy*, yaitu legislatif sebagai *policy*

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

*making (taak stelling)* sedangkan eksekutif sebagai *Policy executing (taat verwezenliiking)*<sup>28</sup>

Dari penelusuran berbagai literature terdapat varian sistem pemerintahan. Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori: *presidentialism*, *parliamentary system*, dan *semi presidentialism*. Lebih variatif lagi Denny Indrayana membuat kategorisasi sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, sistem hybrid atau campuran, sistem kolegal dan sistem monarki.<sup>29</sup>

#### a. **Sistem Parlementer**

Tercatat dalam sejarah, Inggris merupakan tempat kelahiran sistem pemerintahan parlementer. Dari berbagai macam sistem pemerintahan yang dikemukakan tersebut, sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sejak perang Dunia II dua pertiga dari negara-negara dunia ketiga yang memilih sistem pemerintahan parlementer sukses dalam transisi demokrasi.

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem yang *ministerieele verantwoordelijk-heid* (menteri bertanggungjawab terhadap parlemen) ditambah dengan *Overwich* (kekuasaan lebih) kepada parlemen. Dengan argumentasi itu, sistem parlementer dilandaskan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi (*parlement is sovereign*) atau dalam bahasa A. V Dicey *Parlementary supremacy*.<sup>30</sup>

Di dalam sistem pemerintahan parlementer tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini nantinya dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mempertanggung jawabkan pemerintahannya kepada badan perwakilan rakyat atau parlemen. Jadi dalam sistem ini kepala negara tidak merupakan

---

<sup>28</sup> Saldi Isra, *pergeseran fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010) . 24.

<sup>29</sup> *Ibid.* 25

<sup>30</sup> *Ibid.* 28.

pimpinan yang nyata daripada pemerintahan, yang memikul segala pertanggung jawaban pemerintahan adalah kabinet

Menurut Jimly Asshiddiqie ciri sistem parlementer adalah

- 1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif ;
- 2) Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri, dibentuk oleh parlemen dari partai politik yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Jika ternyata di parlemen tidak ada satupun parpol yang menduduki kursi mayoritas maka parpol penyusunan kabinet dan perdana menteri umumnya dilakukan dengan koalisi;
- 3) Kepala negara hanya berfungsi atau berkedudukan sebagai kepala negara saja. Kepala negara tidak dituntut pertanggung jawaban konstitusional apapun sebagai kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara . kendatipun demikian kepala negara juga diberi wewenang menunjuk dan membubarkan serta kabinet dalam keadaan tertentu;
- 4) Adanya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya “ kepada kabinet.

#### **b. Sistem Pemerintahan Presidensial**

Apabila sistem pemerintahan Parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, sistem pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak hanya merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga sebagai contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.

Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri yang lebih detail tentang sistem pemerintahan presidensial, yaitu<sup>31</sup>

- 1) Masa Jabatan presiden tertentu, biasanya periode masa jabatan dibatasi dengan tegas

---

<sup>31</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996), 204-206

- 2) Presiden dan wakil presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden dan Wapres hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus pidana tertentu.
- 3) Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen;
- 4) Presiden tidak tunduk kepada parlemen, parlemen tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet;
- 5) Tidak dikenal pembedaan kepala pemerintah dan kepala negara
- 6) Tanggung jawab pemerintahan berada pada Presiden oleh karena itu, Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintah, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri (*Concentration of governing power and responsibility upon the president* ).

#### c. **Sistem Pemerintahan Campuran**

Dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Misalnya di Swiss yang disebut *Budersrat* (badan eksekutif ) adalah badan pekerja dari *Budesversammlung* (badan legislatif ). Dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Mekanisme kontrol terhadap badan legislatif dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.<sup>32</sup>

#### 2. **Bentuk Pemerintahan.**

Bentuk pemerintah dan sistem pemerintahan sering sekali terjadi pencampuran dalam penggunaan istilah ini. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar . Sri Soematri melihat bentuk pemerintahan

---

<sup>32</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, 56.

sebagai peggambaran struktur organisasi yang dipilih dalam menjalankan negara<sup>33</sup> sedangkan sistem pemerintahan adalah mengenai hubungan antara pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat.<sup>34</sup> Menurut Hans Kelsen, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi republik dan monarki. Jika kepala negara diangkat berdasarkan garis keturunan maka bentuk pemerintahan disebut monarki sedangkan jika kepala negara dipilih berdasarkan pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu maka bentuk pemerintahannya disebut republik<sup>35</sup>

### **C. Teori Sistem multipartai dan Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.**

#### **1. Sistem Multipartai**

Sistem Multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Secara umum Maurice Duverger mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan kuantitas atau jumlah. Menurutnya sistem kepartaian menjadi tiga jenis yakni:

- a. Sistem partai tunggal.
- b. Sistem dwi-partai.
- c. Sistem multipartai.

Secara definisi sistem multipartai memiliki pengertian sistem kepartaian yang meniscayakan adanya partai yang lebih dari dua partai dominan. Dalam konteks Indonesia, sistem multipartai dianggap sangat mendukung kebebasan berkumpul yang terlegitimasi dalam pasal 28 UUD NRI 1945. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem kepartaian disuatu Negara. Untuk konteks politik Indonesia, ada tiga faktor penyebab sistem multipartai yang sulit dihindari. *Pertama*, yakni faktor

---

<sup>33</sup> Hendra Nurtjhjo, *Ilmu Negara; Pengembangan Teori bernegara dan Suplemen*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, Cet. Pertama ), 40.

<sup>34</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia*, 23.

<sup>35</sup> *Ibid*

pembentuk atau tingginya tingkat pluritas masyarakat. Faktor ini menyebabkan keharusan bagi penerapan sistem multipartai. Sementara kemajemukan masyarakat merupakan suatu yang harus diterima dalam stuktur masyarakat Indonesia. *Kedua*, yakni faktor pendorong atau desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum.<sup>36</sup> Dalam kasus Indonesia, sistem multipartai adalah keniscayaan adanya aneka suku, ragam, ras, dan golongan yang ada dalam suatu negara. Selain Indonesia, negara yang menganut ini adalah Malaysia, Belanda, Perancis Swedia, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, klasifikasi mengenai sistem multipartai seperti yang dipaparkan Maurice Duverger tampak sebagai kategori tunggal sehingga gagal menjelaskan mengenai rincian mendetail sistem multipartai, seperti pertimbangan tentang perilaku partai serta jarak ideologis. Melihat kekurangan tersebut, kajian mengenai sistem multipartai telah banyak disempurnakan oleh Giovanni Sartori, sehingga tipologi mengenai sistem multipartai memiliki beberapa varian.<sup>37</sup>

Berikut adalah penjelasan umum Sartori sebagaimana yang dikutip oleh Kuskridho Ambardi tentang sistem kepartaian.

**Tabel II.C.I**  
**Sistem Kepartaian Giovanni Sartori**

Jumlah Partai	Tingkat Ideologi Rendah	Tingkat Ideologi Tinggi
1	Satu –Partai	Tidak ada
2	Dua-Partai	Dua Partai Terpolarisasi
3-5	Plurasisme Moderat	Pluarisme Terbatas, Terpolarisasi
≧ 5	Plurisme Ekstrem	Pluralisme Terpolarisasi

Sumber : Sartori

<sup>36</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati; dari Dilema ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 102

<sup>37</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-Lembaga Survei Indonesia, 2009), 8



## 2. Koalisi Sistem Presidensial.

Studi mengenai sistem presidensialisme pada dasarnya selalu mengalami perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya.

Istilah “koalisi” pada dasarnya berasal dari bahasa latin yakni “*coalescer*” yang secara harfiah berarti saling menempelkan atau saling mengikat. Koalisi pada umumnya merupakan aliansi atau kerjasama untuk periode waktu terbatas dalam rangka demi mencapai tujuan tertentu seperti ambil alih kekuasaan dan memegang pemerintahan.<sup>38</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan koalisi presidensial adalah suatu pendekatan dimana sistem presidensial bisa bekerja layaknya parlementer yang artinya presiden memiliki kerja memerintah dengan mampu membangun koalisi multipartai di legislatif.<sup>39</sup> Menurut Djayadi Hanan, pentingnya koalisi dalam sistem presidensialisme-multipartai manakala presiden tetap memerlukan dukungan legislatif dalam menjalankan pemerintahannya. Jika tidak, presiden mengalami kendala oleh lembaga legislatif melalui kekuasaan anggaran, legislasi dan fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang.<sup>40</sup> Untuk mendapatkan dukungan legislatif, tentu Presiden tidak bisa melakukan tanpa *Feedback* yang harus diserahkan kepada masing-masing partai politik. Oleh karenanya disini, *power sharing* menjadi konsekuensi dalam kombinasi sistem presidensialisme-multipartai untuk menghindari terjadinya *deadlock* dan tingginya oposisi.

### D. Konsep Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

---

<sup>38</sup> Rainer Adam, *Adam, Masa Depan Ada di Tengah; Toolbox Manajemen Koalisi* (Jakarta Friedrich Naumann Stiftung Foundation, 2010), 11

<sup>39</sup> Paul Chaisty, Cheeseman dan Timothy Power, “Rethinking The Presidentialism Debate; Conceptualizing Coalitional Politics in Cross Regional Perspective,” *Democratization*, Routledge, UK, (2012). 1

<sup>40</sup> Hanan. *Menakar Presidensialisme*, 68

Menurut imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Fiqh* secara bahasa berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya<sup>41</sup> sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulam syara' (hukum islam), *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsih* (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijtihad.<sup>42</sup> Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang benar. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakata, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *Istiqomah*.<sup>43</sup>

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendir. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber – sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

591 <sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003),

<sup>42</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan Bintang: 2004 ), 26

<sup>43</sup> Suyuti Pulungan, *fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis Menurut Imam al- Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al- Ahkam al- Sultaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* ( peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter ), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)

Sementara menurut Muhammad Iqbal,<sup>44</sup> dapat disederhanakan menjadi tugas bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah* ) meliputi tentang
  - (1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif
  - (2) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif
  - (3) Administratif pemerintahan (*Idariyyah*) atau eksekuti
- b. Politik luar negeri ( *siyasah dauliyah* ) meliputi tentang
  - (1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm* ) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
  - (2) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyah* )
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah* )

## 3. Sistem Pemerintahan dalam Siyasah Dusturiyah

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta Pranmedia Group, 2014 ), h.

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab I, Islam merupakan agama yang komperensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep Imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah *dusturiyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi Individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

#### a. Imamah

Imamah menurut bahasa berarti 'kepemimpinan'. *Imama* yang memiliki arti 'pemimpin', ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>45</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً  
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ  
الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

*,Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin- pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami*

---

<sup>45</sup> Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*. Tjmh (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15

*wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, ' (Q.S. Al-Anbiya : 73)<sup>46</sup>*

Dengan demikian, (berdasarkan tinjauan arti imamah secara epistimologi), kata imam berarti ,pemegang kekuasaan atas umat Islam'. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa ,imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat

Suyuthi Pulungan dalam bukunya *fiqh siyasah* mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari ,penggantian' kepada pemerintahan' alias ,institusi pemerintahan' dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat islam dalam urusan agama dan politik.<sup>47</sup>

Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata *'amma* yang berarti ,menjadi ikutan'. Kata imam berarti ,pemimpin, atau contoh yang harus diikuti'. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* 328

<sup>47</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 4

memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.

#### **b. Suksesi Imamah**

Berkaitan dengan sistematika untuk menentukan seorang imam, hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme dalam pemilihan Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam. setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda ( empat cara) yaitu:

- 1) Pada pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Sidik, yaitu dengan cara pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara langsung.
- 2) Dengan cara menyampaikan amanat oleh Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khatab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi setelah Abu Bakar wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui syura.
- 3) Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra. sebagai khalifah ketiga.
- 4) Pada pemilihan yang keempat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. Sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

Itulah cara pemilihan kepala negara yang dilakukan pada masa khulafaurrasyidun, dan untuk selanjutnya dalam sejarah Islam kita lihat untuk menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti pada masa bani Umayyah, Abasiyah dan seterusnya yang



paling dominan adalah dengan menggunakan sistem kerajaan

### c. Hak dan Kewajiban Imamah

Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>48</sup>

Adapun tugas dari seorang imamah, yaitu :

- 1) melindungi/menjaga keutuhan agama
- 2) menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata)
- 3) melindungi wilayah negara dan tempat suci
- 4) menegakkan supremasi hukum (*h}udud*) (masalah pidana)
- 5) melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh
- 6) memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi & masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*)
- 7) mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat
- 8) menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
- 9) mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dsb)
- 10) terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan
- 11) Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam keadilan atau fasik, akibat adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.<sup>49</sup>

### d. Struktur Pemerintahan Dalam Imamah

Dengan meneliti dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al- Hadist

---

<sup>48</sup> Ahmad Djzauli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

<sup>49</sup> Imam Al Mawardi, *Al ahkam As-Sulthaniyyah*

ataupun Ijma' Sahabat dan Qiyas, struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam hanya ada delapan bagian, yaitu :

1) *Imam*

Imam adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'.

2) *Mu'awin Tafwid* (Wakil imam bidang pemerintahan)

*Mu'awin Tafwid* adalah seorang pembantu yang diangkat oleh imam agar dia bersama-sama dengan imam memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan.

3) *Mu'awin Tanfiz* (setia usaha negara)

*Mu'awin Tanfiz* adalah pembantu yang diangkat oleh seorang imam untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai imam dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4) *Amir Jihad* (panglima perang)

*Amir Jihad* adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi seorang pimpinan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Dia bertugas untuk memimpin dan mengaturnya.

5) *Wullat* (pimpinan daerah tingkat I dan II)

*Wullat* atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut.

6) *Qadhi* atau *Qadha* (Hakim atau lembaga peradilan)

*Qadhi* atau *Qadha* adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat.

7) *Jihad Idari* (jabatan administrasi umum)

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen, jawatan atau unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut.

8) *Majlis Ummat*

*Majlis Ummat* adalah majlis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan imam dan tempat imam meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin<sup>50</sup>.

Pemerintahan dalam konsep Imamah juga bisa disebut sebagai “pemerintah hukum tuhan atas manusia”. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan yang Islami, berbagai ayat dalam Al-Quran bisa dijumpai yang menerangkan perintah Allah tersebut, diantara yaitu

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu (dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Qs al-Maidah :49)<sup>51</sup>

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hokum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dariapa (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ( Al- Maidah : 50)<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Oksep Ahyanto, khalifah dalam sistem pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol, 1, No 1, (2011), 94-96

<sup>51</sup> Departemen Agama *Al-qur'an dan Terjemahnya* : Al Jumanatul 'Ali, 116.

<sup>52</sup> Ibid

Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintah dalam konsep imamah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan lembaga lembaga dan hukum Islam
- 2) Melaksanakan hukum Islam
- 3) Membangun tatanan yang adil
- 4) Memugut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
- 5) Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam
- 6) Menunjukkan pendidikan
- 7) Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya
- 8) Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi
- 9) Memecahkan masalah kemiskinan
- 10) Memberikan pelayanan kemanusai secara umum<sup>53</sup>

Berdasarkan tujuan dan misi pemerintah tersebut diatas, maka untuk dapatnya dicapai tujuan dari pemerintah didalam konsep imamah tersebut, bagi ummat Islam diberikan hak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintah diperintah untuk bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dengan mengambil yang baik dari masukan masukan nya. Maka dengan demikian cita-cita untuk menciptakan tatanan social yang adil sesuai dengan ketentuan syari'at bisa direalisasikan. Cita-cita keadilan berdasarkan syari'at merupakan cita-cita ideal bagi suatu pemerintahan dalam konsep Imamah.

#### **4. Bai'at**

##### **a. Pengertian Bai'at**

Secara etimologis kata *بيعة* berasal dari akar kata *بيعى* ( menjadi *باعى* ) yang berarti menjual. Bai'at adalah kata jadian yang mengandung arti perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia,

---

<sup>53</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum* , ( Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 142

karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Bai'at berarti juga berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat.<sup>54</sup> Menurut Ibnu Khaldun secara terminologis bai'at adalah perjanjian orang yang berbai'at untuk taat melakukan sumpah setia kepada pemimpinnya bahwa ia akan menyelamatkan pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun tidak disenangi. Sedangkan menurut Ibnu Manzur bai'at adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya.<sup>55</sup> Implementasi bai'at dalam hak dan kewajiban secara timbal balik tergambar dalam al-Quran yang menyatakan, bila datang kepada Nabi perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka ia harus menerima janji itu dan memperlakukan mereka dengan baik serta memohonkan ampunan dari Allah kepada mereka.<sup>56</sup>

b. Dasar Hukum Bai'at

Nabi Muhammad SAW. Telah mewajibkan kepada setiap muslim agar dipundaknya terdapat bai'at. Beliau juga menyikapi orang yang mati, yang dipundaknya tidak terdapat bai'at, sebagai orang yang mati seperti kematian Jahiliyah.<sup>57</sup> Adapun didalam al-quran, ayat-ayat yang menjadi dasar tentang bai'at di antaranya adalah :

---

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dalam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999 ), 179

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Sayuti Pulungan, *fiqh Siyasah*, 73.

<sup>57</sup> Yahya A.R, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintah dan Administrasi )*, (Jakarta : Dar al-Ummah 2006), 16.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ  
 بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ  
 بِهْتَمَانٍ مُّقْتَرِبَةٍ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِمَنَّ فِي مَعْرُوفٍ ۖ  
 فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anaj-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampu lagi Maha Penyayang. (Q.s Al-Mumtahanah : 12 )<sup>58</sup>*

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ  
 نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِهُ اللَّهُ  
 فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya : Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (Q.S. Al- Fath : 10 )<sup>59</sup>*

#### c. Sejarah Bai'at

Bai'at yang mencerminkan adanya koalisi didalam pemilihan

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Juz 1-30, 551.

<sup>59</sup> *Ibid*, 512.

kepala Negara bisa dilihat dalam peristiwa pembai'atan terhadap khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Dimana pada saat itu terjadi perdebatan yang sengit antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasul SAW. Pada peristiwa itu tersebut Umar mengusulkan agar Abu Bakar yang menjadi pemimpin namun usulan tersebut tidak begitu saja langsung diterima malah terjadi perdebatan. Ada beberapa nama selain Abu Bakar yang dikemukakan masyarakat saat itu, diantaranya adalah Ali bin Abi thalib dan Sa'd bin Ubadah. Ditengah-tengah perdebatan tersebut akhirnya ada dua orang yang masing-masing dari suku Kharaj dan dari kaum 'Aus yang kemudian menyatukan baiatnya terhadap Abu Bakar. Orang tersebut adalah Basyir bin Sa'd, ayah Nu'man bin Basyir, saudara sepupu Sa'd bin Ubadah, ketua suku Khazaj dan pemimpin kaum 'Aus, Usaid bin Hudhair.<sup>60</sup> Maka setelah Umar Bin Khattab dan dua orang tersebut menyatakan Ba'atnya kepada Abu Bakar, ba'at tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga demikian Abu Bakar yang akhirnya terpilih sebagai Pemimpin.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> O.Haskem, *sejarah Islam : Wafat Rasulullah Dan suksesi Sepeninggal Beliau Di Saqifah*, (Jakarta : Yapi, 2004 ), 108

<sup>61</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU dan JURNAL.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Al-Arif, M. Yasin. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amademen UUD 1945." *IUS QUIA IUSTUM*, 2015: 238-254.
- AR, Hanta Yuda. *presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Utama , 2010.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan : Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar pemerintahan di berbagai Negara* . Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur'an*, Jakarta : Budi Aksara, 2004.
- Agama Departemen Ri, *Al Quran dan Terjemahannya juz 30* Jakarta : Departemen Agama, 2010.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*. Tjmh Jakarta: Gema Insani Prees, 1997
- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – Lembaga Survei Indonesia, 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pregeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konsitusi Press, 2006.
- Assidique, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Assidique Jimly *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakrta: UI Press, 1996
- Cheibub, Jose Antonio. "Presidentialism, Parleментарism and Democracy", dalam Djayadi Hanan. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia; Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 2014
- Dahl, Robert. "Pattern of Opposition," dalam Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – Lembaga Survei Indonesia, 2009
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Djauli. *Fiqh Siyasah : Implemtasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003



- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia; Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 2014.
- Haris, Syamsuddin. *Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008)*. Disertasi Doktorat di FISIP Universitas Indonesia.
- Harris, Syamsuddin. *Praktek Parleментар Demokrasi Presidensial di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi dokterin politik Islam* . Jakarta: Purnamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legilasi, Menguatnya Model Legilasi Parleментар dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Darul Falah, 2006
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarata: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah politik Islam sejak Muhammad Saw. Hingga M khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sartori. Giovanni. "Parties and Party System: A Framework of Analysis," dalam Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – Lembaga Survei Indonesia, 2009.
- Santoso Rudi *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintergrasi* " Jurnal Nizham, Vol. 11, No. 02 Juli-Desember 2019.
- Santoso Rudi , dkk *Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara ( suatu kajian tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Indonesia )*, Jurnal Nizham , vol 8, No. 1 Januari –juni 2020.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Konpress, 2012.
- Soekanto, seojono. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2m IANIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Yubsir "Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum : Telaah Filsafat Hukum Islam" *Al-Adalah Vol XI No 2*. Juli 2013.241-247

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

## **WEBSITE**

Untuk Wakil Menteri Luar Negeri diisi oleh Am Fachir dan Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Mardiasmo. Lihat, “selain Menteri, Jokowi juga Lantik2wakilmenteri,”<https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/10/27/12353901/Presiden.Juga.Lantik.Wamenlu.dan.Wamenkeu>. Diunduh 5 januari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020.12/22/191029765/jokowi-ganti-6-menteri-berikut-riwayat-reshuffle-kabinet-sejak-periode?amp=1&2page-2> diunduh 5 januari 2021

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/Kpts/KPU/tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilihan Umum 2014,” *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, [www.kpu.go.id/.../SK\\_KPU\\_416\\_Penetapan\\_Kursi\\_Calon\\_Terpilih\\_1452014.pdf](http://www.kpu.go.id/.../SK_KPU_416_Penetapan_Kursi_Calon_Terpilih_1452014.pdf) diunduh 5 Januari 2021.

Hasil Verivikasi Adminstrasi Kelengkapan Syarat Partai Politik Sebagai Calon peserta Pemilu DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, “*komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, [www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol\\_Lolos.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol_Lolos.pdf), Diunduh pada 5 Januari 2021.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 5/kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, “*komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*,[www.kpu.go.id/dmdocuments/\(9.1.2013\)%2005%20SK%20Ketu%20a.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/(9.1.2013)%2005%20SK%20Ketu%20a.pdf). Diunduh pada 5 januari 2021.